

**Mengurai Permasalahan Pengembangan Koperasi Syariah di Lombok: Pendekatan
*Analytic Network Process***

Kharisma Rindang Sejati

Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail: kharismarindangsejati@uinmataram.ac.id

ABSTRACT.

Sharia cooperative has become an alternative to restoring the economic conditions in Lombok, particularly for providing the capital to the small entrepreneurs. The massive development of the Sharia economic sector has led NTB provincial government to intensify the development of sharia economic system through sharia cooperatives. Despite the massive support from the local government, Sharia Cooperative still has several problems, both internally and externally. This article aims to identify the dominant factors that obstruct the development of Sharia cooperative in Lombok, by using the Analytic Network Process (ANP) method approach. The results shows that the main problem is the unqualified human resources as indicated by the level of suitability or agreement between the respondents based on the Kendall coefficient, Kendall coefficient (W) on the priority aspects of the problem for respondents consisting of regulators, root and academics, relatively on high number, around $W = 0.725$. This data shows that the regulators, the practitioners, and the academics are on the same position regarding the main problem that impede developing Islamic cooperatives in Lombok.

Keywords: Problems, Sharia Cooperative, Analytic Network Process (ANP)

ABSTRAK.

Koperasi syariah mulai tumbuh sebagai alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Lombok, khususnya untuk bekerjasama dengan para pengusaha kecil dalam penyediaan modal. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah, menimbulkan semangat dari pemerintah daerah provinsi NTB untuk terus menumbuhkan sistem ekonomi syariah melalui koperasi syariah, meski mendapat dorongan dari pemerintah dalam mengembangkan koperasi syariah masih memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi syariah baik dari sisi internal maupun eksternal. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi syariah di Lombok, dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pokok yang muncul dalam pengembangan koperasi syariah di Lombok adalah Sumber Daya Manusia (SDM) belum profesional yang ditunjukkan oleh tingkat kesesuaian atau persetujuan antar responden berdasarkan Kendall's coefficient nilai koefisien Kendall's (W) yang relatif besar pada aspek prioritas masalah terhadap responden yang terdiri dari regulator, praktisi dan akademisi yaitu $W = 0.725$. Hal itu menunjukkan bahwa antara regulator, praktisi dan akademisi sepaham dalam pendapatnya terkait permasalahan pengembangan koperasi syariah di Lombok.

Kata kunci: Permasalahan, Koperasi Syariah, Analytic Network Process (ANP)

PENDAHULUAN

Koperasi syariah pertama kali muncul di Indonesia sebagai jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan umat Islam yang mengharapkan adanya lembaga keuangan mikro berbasis syariah, dengan kehadiran koperasi syariah maupun *baitul maal wattamwil* (BMT) yang memiliki pola kegiatan pembiayaan dengan pola syariah menjadi pembeda antara koperasi konvensional (Sagara, 2016). Adanya efek berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian bagi anggotanya karena

memiliki asas gotong royong yang merupakan konsep awal dari koperasi (Adnan & Ajija, 2015). Melalui koperasi syariah anggota dapat meningkatkan pendapatan hingga mengurangi kemiskinan melalui transfer pendapatan dari optimalisasi zakat, infaq dan sedekah (Rahman, 2010). Serta meningkatkan efisiensi dan keadilan dengan upaya meningkatkan *endowment* (meningkatkan *production possibility frontier*) (Karim, 2014).

Sejak bulan Februari 2005, Indonesia telah mencanangkan keuangan mikro untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta pengembangan dan jaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Ascarya, 2005).

Sesuai dengan peraturan presiden tersebut pemerintah provinsi NTB melakukan pengembangan koperasi syariah yang lebih berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan membentuk 500 unit koperasi. Terutama mendorong kerjasama dengan UMKM yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ascarya, 2014), karena masih banyak sektor UMKM yang belum tersentuh oleh perbankan. Banyaknya jumlah koperasi syariah di beberapa daerah diharapkan dapat menjadi penopang untuk UMKM, namun ternyata tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini terus berkembang dan berjalan dengan baik (Putri, 2017). Banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar; antara lain karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional, kurangnya kemampuan usaha dan kemampuan manajemen bisnis (Yuniar, 2015), dan modal atau likuiditas yang dimiliki koperasi hanya berasal dari anggota saja (Rusydiana & Devi, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja hambatan yang dihadapi institusi koperasi syariah di Lombok? Apa solusi yang tepat untuk masalah tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pakar, praktisi, regulator dan akademisi yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner terhadap responden yaitu pakar, praktisi, regulator dan akademisi pada pertemuan kedua (Siregar, 2013).

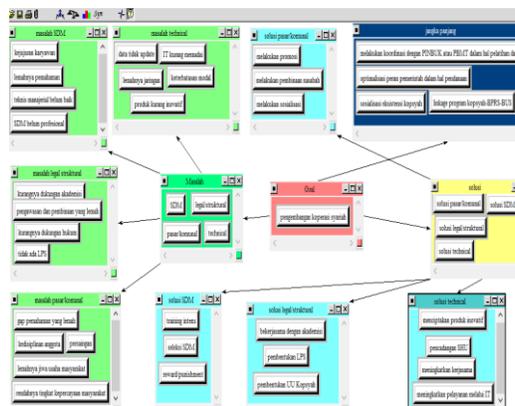
Populasi dan Sampel

Pemilihan responden dalam penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman responden (Siregar, 2017) tentang koperasi syariah di Lombok, terutama tentang permasalahan pengembangan koperasi syariah. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu praktisi, regulator dan akademisi dengan pertimbangan kemampuan yang kompeten sebagai syarat respon valid dalam metode analisis ANP.

Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi koperasi syariah di Lombok dalam pengembangannya serta mencari tahu solusi dari permasalahan tersebut.

Gambaran Metode ANP

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Bertujuan untuk menangkap suatu nilai, pandangan serta pendapat yang diwakilkan oleh pakar, regulator dan praktisi syariah tentang koperasi syariah di Lombok berdasarkan pengalaman para responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ANP dan pengolahannya menggunakan software “Super Decision”.



Gambar 1. Model Penelitian Jaringan ANP
Sumber: Output Super Decision

Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang ditujukan untuk menganalisis pengaruh variabel melalui pendekatan hipotesis-hipotesis untuk menyelesaikan permasalahan dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah dengan penguraian masalah disertai adanya skala prioritas yang diharapkan menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu mendeskripsikan *feedback* dari model faktor-faktor dependennya secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirik (Saaty & Vargas, 2013).

Landasan ANP

Saaty dan Vargas (2013) menyebutkan ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, yaitu:

1. Resiprokal; aksioma ini digunakan untuk membuktikan membuktikan bahwa PC (EA,EB) adalah dilihat dari elemen Utamanya yaitu C, yang menunjukkan berapa kali jumlah yang dimiliki elemen A serta memiliki apa yang dimiliki elemen B untuk melihat perbandingan nilai yang berpasangan antara elemen A dan B, dengan, maka $PC (EB,EA) = 1/ P_c (EA,EB)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya $1/5$ dari besar A.

2. Homogenitas; mencerminkan bahwa elemen-elemen yang menjadi pembanding dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, karena akan menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam penentuan nilai elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Tabel 1. Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate Importance	3
Moderate Plus	4
Strong Importance	5
Strong Plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very, very strong	8
Extreme Importance	9

3. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran yang relatif dominan.
4. *Dependence condition*; diasumsikan bahwa susunan kondisi dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen dalam bentuk *cluster* (Rusydia & Devi, 2013).

Tahapan Metode ANP

1. Konstruksi Model
Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dengan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi koperasi syariah secara *indepth interview* untuk mengkaji informasi lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.
2. Kuantifikasi Model
Tahap kuantifikasi model yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (pembandingan pasangan) antarelemen dalam *cluster* untuk mengetahui di antara elemen tersebut memiliki pengaruh (lebih dominan) dan melalui skala numerik 1-9 untuk mengetahui seberapa besar perbedaannya. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software Super Decision untuk diproses sehingga menghasilkan output dalam bentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya, 2005).
3. Sintesis dan Analisis
Sintesis dari prioritas kriteria dan alternatif pilihan serta pemilihan alternatif terbaik: bobot prioritas dari kriteria dan alternatif dapat diketahui dari supermatriks yang telah dinormalisasi.

a. *Geometric Mean*

Digunakan untuk melihat hasil penilaian individu dari para responden sehingga dapat menentukan hasil penilaian dengan menghitung geometric mean pada satu kelompok (Saaty, 2013). Pertanyaan berupa perbandingan pasangan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dengan formula sebagai berikut :

$$\left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2, a_n}$$

b. *Rater Agreement*

Rater agreement adalah menunjukkan ukuran tingkat kesamaan (persetujuan) para responden ($R_1 - R_n$) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah Kendall's Coefficient of Con-cordance untuk menunjukkan kesesuaian yang sempurna dengan syarat ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$. Penjumlahan ranking yang diberikan pada setiap jawaban responden digunakan untuk menghitung Kendall's (W)

$$R_i = \sum_j^m 1r_{ij}$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$R = \frac{1}{2} m(n+1)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = \sum_i^n 1(R_i - R)^2$$

Sehingga diperoleh Kendall's W ,

$$W = \frac{12S}{m^2(n^2 - n)}$$

yaitu:

Jika pengujian nilai W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, nilai tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pengembangan koperasi syariah di Lombok dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Teknis (*Technical*), Legal/Struktural, Pasar/Komunal. Cluster-cluster tersebut secara keseluruhan dikelompokkan menjadi *cluster* masalah (problem), dan *cluster* solusi.

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

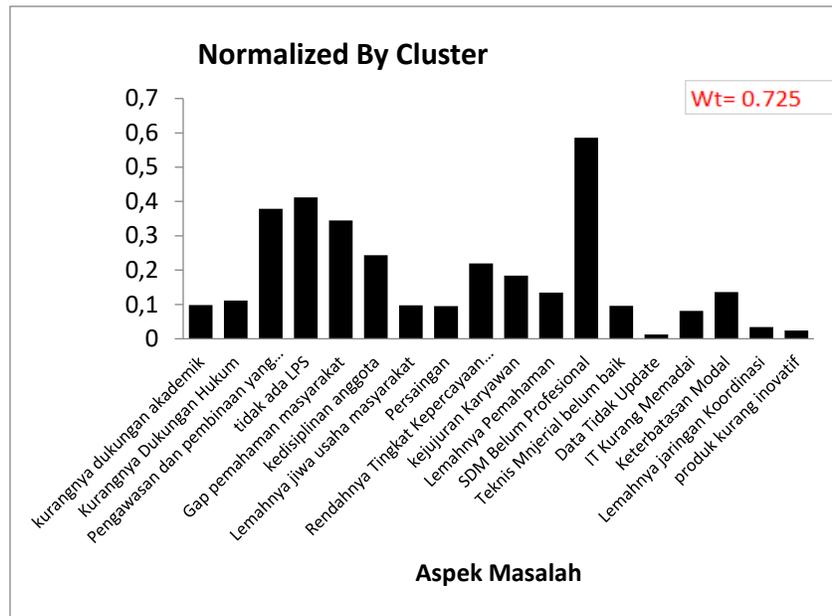
Masalah sumber daya manusia ini merupakan aspek terpenting saat menjalankan kegiatan operasional koperasi syariah, karena beberapa masalah disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihadapi oleh koperasi syariah adalah:

- a. Lemahnya pemahaman praktisi koperasi syariah baik pengelola maupun karyawan koperasi syariah. Sehingga seringkali dalam menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk koperasi syariah masih belum mampu memberikan penjelasan yang lengkap terhadap anggota maupun calon anggota.
 - b. Sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional dalam hal pengembangan bisnis koperasi syariah maupun dari sisi syariah, karena sebagian besar praktisi koperasi syariah di Lombok bukan merupakan lulusan syariah dan diawali dengan belajar secara otodidak mengenai ekonomi syariah dan pengelolaan koperasi syariah
 - c. Teknis Manajerial yang belum baik. Berkaitan dengan SDM yang belum profesional juga menimbulkan teknis manajerial yang belum baik dalam pengelolaan koperasi seperti produk apa yang harus ditawarkan, perlakuan akuntansi secara syariah dan lain-lain.
 - d. Kejujuran karyawan. Banyaknya koperasi yang gulung tikar akibat dari tindakan karyawan yang melakukan kecurangan (*fraud*) dalam *accounting* dan *finance*.
2. Masalah *Technical*

Masalah teknis ini sangat berkaitan dengan jalannya operasional koperasi syariah. Masalah teknis yang dihadapi koperasi syariah adalah:

- a. Data tidak update. Validitas data koperasi syariah kerap kali tidak update dan tidak terstruktur. Data yang kurang update menjadi masalah karena menjadi tolok ukur dari koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
 - b. Keterbatasan modal. Modal yang dimiliki koperasi syariah sebagian besar dari simpanan pokok, simpanan wajib anggota serta tabungan/simpanan anggota. Karena kesejahteraan anggota dicerminkan oleh pendapatan sisa hasil usaha (SHU) yang menunjukkan peningkatan (Winarko, 2014).
 - c. Kurang memadainya fasilitas/infrastruktur Teknologi Informasi (IT). Banyaknya koperasi syariah yang belum memiliki Teknologi Informasi (IT) menjadi masalah yang penting, karena koperasi syariah merupakan lembaga jasa yang harus mengutamakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah/anggota.
 - d. Inovasi produk yang lemah. Inovasi produk dan jasa, pemasaran dan pengembangan koperasi syariah yang lemah, pertama disebabkan teknologi informasi (IT) yang kurang memadai, kedua disebabkan oleh pemahaman pengelola yang lemah bahkan disebabkan oleh anggota koperasi syariah tersebut.
 - e. Lemahnya jaringan kerjasama koperasi syariah. Lemahnya jaringan koordinasi dan kerjasama koperasi syariah terhadap lembaga-lembaga apex seperti PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan PBMT.
3. Masalah Legal/Struktural
- Beberapa masalah legal/struktural yang masih menjadi hambatan bagi pengembangan koperasi syariah di Lombok adalah:

- a. Kurangnya dukungan hukum. Kurangnya dukungan hukum untuk koperasi syariah adalah bukan tentang pembentukan legalitasnya namun kurangnya dukungan hukum dari pemerintah dalam hal pembentukan peraturan tentang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bagi koperasi syariah.
 - b. Tidak ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Tidak adanya LPS seringkali menjadi hambatan bagi koperasi syariah berkembang, karena banyak masyarakat/ anggota/calon anggota yang khawatir terhadap dana yang disimpan.
 - c. Pengawasan dan pembinaan yang Lemah. Masalah paling krusial di sini hanyalah pengawasan, yang memang terasa masih lemah, dari segi pengawasan kesehatan koperasi syariah.
 - d. Kurangnya dukungan akademisi. Kurangnya dukungan akademisi dalam hal riset/penelitian terhadap koperasi syariah tentang permasalahan dan cara penanganan dari masalah tersebut.
4. Masalah Pasar/Komunal
- a. Gap pemahaman yang lemah. Gap pemahaman antara masyarakat masih kurang seperti pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan koperasi syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan, maupun keunggulan koperasi syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya.
 - b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di koperasi syariah karena rasa tidak percaya kepada koperasi syariah.
 - c. Kedisiplinan anggota. Masih lemahnya kedisiplinan anggota dalam membayar simpanan wajib dan membayar cicilan pembiayaan pada koperasi.
 - d. Persaingan. Salah satu permasalahan yang masuk dalam bagian ini adalah masalah persaingan, baik persaingan antarkoperasi syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan mikro lainnya.
 - e. Rendahnya jiwa usaha masyarakat. Lemahnya pengembangan budaya dan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) masyarakat, sehingga sebagian besar anggota melakukan realisasi pembiayaan untuk kegiatan konsumsi.



Gambar 2. Prioritas Masalah

Sumber: Diolah

Dalam prioritas aspek masalah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3. baik regulator, akademisi maupun praktisi setuju bahwa memang terdapat masalah yang krusial adalah SDM yang belum profesional dengan nilai *rater agreement* yang tinggi ($W=0.725$). Problem yang paling krusial yang menjadi perhatian para responden selanjutnya adalah tidak ada LPS, lemahnya pengawasan dan pembinaan, dan masih lebarnya gap pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah.

Rater agreement yang relatif tinggi yakni sebesar 0.725 menunjukkan bahwa baik pakar/akademisi maupun praktisi dan regulator relatif sepaham dalam menentukan prioritas aspek masalah dalam pengembangan koperasi syariah di Lombok. Terutama empat aspek masalah pertama dari serangkaian masalah yang ada.

Hasil Uji Identifikasi Solusi

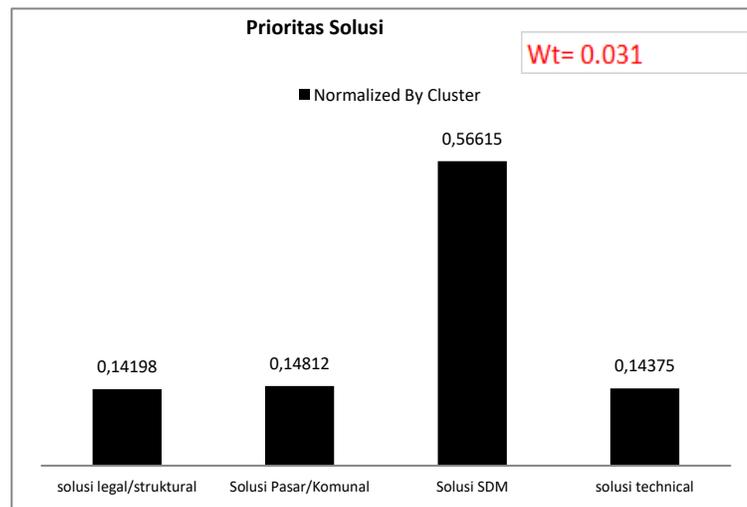
Dari permasalahan pengembangan koperasi syariah di Lombok, berikut solusi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola dan meningkatkan perkembangan koperasi syariah di Lombok:

1. Solusi SDM (Sumber Daya Manusia)
 - a. Melakukan seleksi SDM
 - b. Melakukan training secara intens
 - c. Pemberian reward/punishment
2. Solusi Teknis
 - a. Meningkatkan kerjasama

- b. Meningkatkan pelayanan melalui Teknologi Informasi (IT)
 - c. Meningkatkan inovasi produk
 - d. Melakukan pencadangan SHU (Sisa Hasil Usaha)
3. Solusi Pasar/Komunal
- a. Melakukan pembinaan nasabah
 - b. Melakukan promosi
 - c. Melakukan sosialisasi
4. Solusi Legal/struktural

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dalam hal legal/struktural, maka pemerintah harus dapat merevisi dan membantu koperasi dalam hal pembentukan Undang-Undang atau peraturan tentang pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi koperasi.

Terkait cluster solusi, hasilnya tidak jauh berbeda dengan cluster masalah. Untuk prioritas solusi, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2. yang terdiri dari hasil *geometric mean* secara keseluruhan memperlihatkan bahwa solusi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan solusi yang paling utama, diikuti oleh solusi pasar/komunal. Setelah itu, prioritas solusi adalah solusi teknis, baru kemudian solusi legal/struktural.



Gambar 3. Prioritas Solusi

Sumber: Diolah

Dalam hal ini, para responden memiliki tingkat *rater agreement* sebesar ($Wt=0.031$). nilai *rater agreement* yang kecil ini menunjukkan bahwa pendapat responden atas prioritas solusi bervariasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan koperasi syariah di Lombok terdiri dari 4 aspek penting yaitu: SDM, teknis, aspek legal/struktural,

dan aspek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas:

1. SDM belum professional
2. Tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
3. Pengawasan dan Pembinaan yang lemah
4. Gap pemahaman masyarakat
5. Kedisiplinan anggota.

Ranking tertinggi prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dari pengembangan koperasi syariah di Lombok terdiri dari:

1. Pemberian *reward/punishment*
2. Meningkatkan pelayanan melalui IT
3. Pembentukan LPS BMT
4. Melakukan promosi
5. Pembinaan Nasabah.

Tingkat kesesuaian atau persetujuan antarresponden berdasarkan Kendall's coefficient menunjukkan nilai koefisien Kendall's (W) yang relatif besar pada aspek prioritas masalah terhadap responden yang terdiri dari regulator, praktisi dan akademisi yaitu $W = 0.725$. Hal itu menunjukkan bahwa antara regulator, praktisi dan akademisi sepeham dalam pendapatnya terkait mencari masalah pengembangan koperasi syariah di Lombok.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty. *Humanomics*, 31(2), 160–182.
doi: <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.

Ascarya. (2005). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.

Ascarya. (2014). Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 6(2), 49–85.
doi: <https://doi.org/10.12816/0019263>.

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putri E, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *E-Journal Administrasi Negara*.

Rahman, A.R.A. (2010). Islamic Microfinance: an Ethical Alternative to Poverty Alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295.
doi: <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>

Rusydiana, A.S, & Devi, A. (2013). Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Metode BOCR ANP. *Ekonomi Dan Bisnis Islami*.

Rusydiana, A.S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>

Saaty, T. L. (2013). *The Analytic Network Process. Decision Making with the Analytic Network Process*, 195, 1–40.
doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7279-7_1

Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). *The Analytic Network Process. Decision Making with the Analytic Network Process*, 195, 1–40.
doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7279-7_1

Sagara, Y. (2016). Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Maal Tamwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat. *Social Science Education Journal*, 3(1), 81–91.
doi: <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.4178>

Siregar, S. (2013). *Statistika Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, S. (2017). *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Winarko, S.P. (2014). Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Kediri. *Nusantara of Research*, 01(2), 151–167.

Yuniar, G. N. (2015). Development of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) as an Instrument for Poverty Reduction. *Advances in Economics and Business*, 3(2), 41–44.
doi: <https://doi.org/10.13189/aeb.2015.030201>